

## INDIKATOR PEMBANGUNAN TERHADAP KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAKWAH ISLAM

M. Arkansyah M<sup>1</sup> Aulia Hadistiara<sup>2</sup> Farida Amalia<sup>3</sup> Ade Nur Rohim<sup>4</sup> Faizi<sup>5</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[2110116026@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110116026@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2110116036@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110116036@mahasiswa.upnvj.ac.id),

[2110116038@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110116038@mahasiswa.upnvj.ac.id), [adenurrohim@upnvj.ac.id](mailto:adenurrohim@upnvj.ac.id),

[faizi.feb@upnvj.ac.id](mailto:faizi.feb@upnvj.ac.id)

### Abstrak

#### Kata kunci:

Indikator  
Pembangunan,  
Kemiskinan,  
Pendidikan

Indikator pembangunan merupakan suatu tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Indikator pembangunan meliputi indikator kuantitatif dan kualitatif. Dalam Islam pembangunan memiliki tujuan yang luas yaitu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Indikator pembangunan yang dapat mengukur kemiskinan, diantaranya indikator tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita dan jumlah kepadatan penduduk suatu negara. Maka upaya yang dapat dilakukan negara yakni meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, menekan pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi SDM yang berdedikasi unggul. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dengan mengutip pendapat para tokoh dan jurnal-jurnal terdahulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan masalah kemiskinan yang dikaitkan dengan indikator tingkat pendidikan. Memberikan akses pendidikan seluas-luasnya dapat membantu pemerintah agar keluar dari jeratan kemiskinan.

### Abstract

#### Keywords:

Development  
Indicators,  
Poverty, Education

Development indicators are a benchmark in measuring the success of a country's development. Development indicators include quantitative and qualitative indicators. In Islam, development has a broad goal, namely achieving prosperity and happiness in the world and in the hereafter. Poverty is one of the main problems in development in developing countries. Development indicators that can measure poverty include indicators of the level of education, health, income per capita, and the total population density of a country. So the efforts that can be made by the state are increasing access to education, and health, suppressing population growth, and empowering the community so that they become superior dedicated human resources. The research method used in this article is a literature study by quoting the opinions of previous figures and journals. The purpose of this study was to determine the relationship between poverty problems associated with educational level indicators. Providing the widest possible access to education can help the government get out of the poverty trap.

## A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu hal yang bersifat multidimensi dan mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan. Dalam mengukur suatu pembangunan ekonomi harus membahas masalah perubahan struktur sosial, sistem kelembagaan, perubahan sikap, dan perilaku masyarakat yang turut pula menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, negara tidak lagi begitu mempedulikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama yang harus dicapai. Akan tetapi, negara juga mulai memperhatikan sisi pembangunan ekonomi yang sering dikaitkan dengan kualitas hidup dan kebahagiaan manusia yang ada didalamnya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara memiliki hubungan garis lurus yang berarti jika pertumbuhan ekonomi suatu negara naik, begitu pula dengan pembangunan ekonomi negara tersebut. Menurut Todaro (2011) pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan standar hidup, perbaikan kebebasan dan kepercayaan diri masyarakatnya. Selain pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara umum, terdapat juga pertumbuhan dan pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Bagaimanakah Islam memandang pembangunan ekonomi suatu negara?

Pembangunan dalam konteks Islam tentunya dilandaskan kepada sumber utama umat muslim yaitu Al-Quran dan Hadist. Artinya bahwa segala kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tidak bisa bertentangan dengan dua hal tersebut. Islam pada dasarnya sudah menyediakan feature yang sesuai dengan ajarannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Seperti contoh yaitu jika seseorang ingin memulai sebuah usaha kecil-kecilan bisa dilakukan dengan bentuk

kerjasama mudharabah, zakat dan infaq untuk pemerataan, dan lain-lain sesuai syariat agama Islam.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang memiliki aturan dan prinsip yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam, tentunya akan memiliki turunan nilai yang sedikit berbeda dengan ekonomi konvensional. Salah satu hal yang membedakan ialah setiap proses pembangunan harus mampu mencapai lima tujuan dalam *maqashid syariah*, yaitu: *Hifdzu din* (melindungi agama); *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa); *Hifdzu aql* (melindungi pikiran); *Hifdzu mal* (melindungi harta); dan *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Kelima *maqashid* tersebut dimaknai secara bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *mashlahah* dan kepentingannya. Tingkatan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu: *Dharuriyat* atau kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi rusak; *Hajjiyat* atau kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan; dan *Tahsiniyat* atau kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Permasalahan pembangunan ekonomi suatu negara tidak jauh dari kemiskinan yang merajalela dan kesejahteraan yang tidak merata. Saat pembangunan tidak berjalan dengan baik dan tidak merata, maka akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya kemiskinan. Hal ini diibaratkan bahwa pembangunan adalah tonggak utama dalam tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan program pemerintah yang memiliki tujuan utama meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negara. Jika pembangunan dalam negeri mencapai keberhasilan dan kesamarataan, maka pertumbuhan ekonomi negara pun akan menunjukkan laju positif. Kondisi

pertumbuhan positif inilah yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan tentu terhindar dari kemiskinan.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kemiskinan berbanding terbalik, saat IPM mengalami penurunan sebesar 1% maka akan menaikkan kemiskinan sebesar -0.28% (Noor Zuhdiyati, 2017). Berdasarkan data ini diketahui bahwa IPM menjadi faktor penting kemiskinan. Saat IPM menunjukkan tingkat yang rendah, maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat. Tingkat IPM dipengaruhi oleh indikator-indikator pembangunan, indikator pembangunan terdiri dari indikator kualitatif dan kuantitatif. Indikator kuantitatif didasarkan pada tingkat pendapatan dan jumlah penduduk yang dapat dihitung, sedangkan indikator kualitatif didasarkan pada tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang dapat dibandingkan.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini mencoba untuk menganalisis terkait bagaimana persoalan kemiskinan jika dilihat dari faktor pembangunan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indikator pembangunan dengan kemiskinan di Indonesia. Tinjauan penelitian ini menggunakan kajian literatur (studi pustaka) pada penelitian terdahulu dan sumber pendukung lainnya.

## B. Kajian Literatur

### Indikator Kualitatif Pembangunan

Indikator pembangunan kualitatif berarti indikator dengan data berupa tulisan yang bersifat deskriptif dan dapat dianalisis. Indikator kualitatif terdiri dari etos kerja dan pola pikir, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Indikator kualitatif merupakan data yang hanya dapat dibandingkan untuk mengetahui negara tersebut dapat

dinyatakan negara maju, negara berkembang maupun negara yang masih miskin.

Indikator etos kerja dan pola pikir dapat diartikan sebagai semangat dan pola pikir para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kurangnya perilaku etos kerja adalah permasalahan yang sering terjadi. Peranan SDM sangat penting untuk meningkatkan semangat bekerja, karena jika kita memiliki SDM yang produktif dan punya semangat hidup tinggi, akan mempengaruhi peningkatan pembangunan dalam negeri. Diperlukan SDM yang unggul di berbagai bidang agar dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi negara.

Salah satu modal bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia yang dapat berperan aktif membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik, sehingga dapat melaksanakan pembangunan nasional adalah sumber daya manusia. Upaya yang dapat dilakukan SDM untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional dapat melalui bidang pendidikan. Pendidikan memberikan seorang individu pengetahuan, keterampilan dan menanamkan nilai karakter bangsa, sehingga dapat berdaya saing secara global. Melalui pendidikan, negara juga dapat meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan peningkatan angka melek huruf bagi masyarakat. Pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi dalam negeri dapat diwujudkan dengan memperluas pengetahuan serta wawasan masyarakat, dengan begitu masyarakat akan memiliki pemikiran yang terbuka dan modern sehingga tidak cenderung berpikiran kuno.

Kesehatan merupakan salah satu modal manusia yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Menurut Renstra Kemenkes (2015) pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat, sehingga nantinya dapat dijadikan investasi bagi pembangunan SDM yang produktif. Hal ini dikarenakan kesehatan menjadi prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, diantaranya perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan meningkatnya partisipasi tenaga kerja dan akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik maka itu dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

### **1. Indikator Kuantitatif Pembangunan**

Indikator pembangunan kuantitatif merupakan indikator berupa data yang dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan serta kemajuan suatu negara. Indikator kuantitatif terdiri dari beberapa aspek yang mempengaruhi kemajuan pembangunan suatu negara, diantaranya pendapatan per kapita negara dan tingkat kepadatan penduduk. Pendapatan Regional per Kapita (PDRB) tidak jarang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu negara, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin sejahtera negara tersebut. Pembangunan ekonomi berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan per kapita (Mahendra, A., 2017). Segala upaya pelaksanaan pembangunan dalam negeri memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu sebelum dilaksanakannya program pembangunan, tentu pemerintah merancang strategi yang tepat agar pembangunan dapat memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam program pengadaan transportasi di Jakarta

yakni Transjakarta di berbagai daerah. Dengan adanya Transjakarta, masyarakat menjadi mudah untuk bepergian ke berbagai daerah di Jakarta. Program ini juga akan menambah pendapatan daerah melalui transaksi pembelian kartu dan pengisian saldo oleh masyarakat.

Tingkat kepadatan penduduk juga berpengaruh pada pembangunan. Sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan kualitas individu saja, tetapi juga akan berkaitan dengan kuantitatif (Yudi, A. & Eka, S., 2020). Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan berpotensi besar terhadap pembangunan, dengan syarat bahwa setiap individu memiliki kualitas yang berdaya saing tinggi. Untuk itu sebelum memanfaatkan jumlah penduduk, maka pemerintah memiliki tugas dan berkewajiban untuk menciptakan SDM yang berdedikasi tinggi. Tahap utama pemerintah perlu adanya perbaikan dalam akses pendidikan serta kesehatan yang merata dan memadai. Jika pendidikan dan kesehatan sudah didapatkan oleh seluruh masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menunjukkan dampak yang positif. Kemudian, jika IPM yang dimiliki Indonesia sudah meningkat, maka hal ini dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi negara yang baik dan masyarakat akan mencapai kesejahteraan.

### **Definisi Kemiskinan**

Pada tahun 1990, Bank Dunia menyatakan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup. Setelah itu di tahun 2004, mereka mendefinisikan ulang kemiskinan secara lebih rinci yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan merupakan tidak adanya tempat tinggal. Kemiskinan adalah tidak mampu pergi ke dokter ketika sakit. Kemiskinan adalah tidak bisa ke sekolah dan tidak tahu caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak bekerja dan khawatir akan masa

depan". *United Nations Development Programme* atau UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kurangnya pendapatan dan kesulitan keuangan. Namun, kemiskinan juga dilihat sebagai kondisi kurangnya akses pendidikan, kesehatan atau air minum bersih atau mempengaruhi proses politik dan faktor-faktor lain yang penting bagi manusia. Maka dari itu UNDP melihat kemiskinan sebagai masalah multidimensi yang tidak terbatas pada kurangnya pendapatan dan sumber daya keuangan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kemiskinan adalah sebuah keadaan dimana seseorang tidak bisa mengurus dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya, dan juga tidak mampu untuk menggunakan tenaga mental dan fisik mereka dalam kelompok tersebut. Menurut Gillin dan Gillin, kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak bisa mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan orang tersebut menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang terbatas atau pengeluaran yang berlebihan. Sementara pengertian kemiskinan yang sering dipakai di Indonesia merupakan pengertian yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pengertian kemiskinan menurut BPS memakai pendekatan kebutuhan dasar. Melalui pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai tidak mampunya memenuhi kebutuhan dasar baik itu makanan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Kemiskinan bisa dibilang sebagai sebuah keadaan dimana seseorang atau bahkan beberapa orang mempunyai kesukaran dalam memenuhi kebutuhan dasar. Keadaan ini tidak hanya berlatar belakang dari kemalasan dalam mencari penghasilan atau bekerja namun juga karena adanya faktor sosial ekonomi yang

mempengaruhi munculnya kemiskinan. Di tahun 2021, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa orang-orang miskin yang ada di Indonesia sudah mencapai 27,55 juta orang dan kemungkinan besar jumlahnya akan terus naik. Bukan hanya satu hal saja yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Edi Suharto dalam bukunya *Buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, banyak faktor yang berkaitan yang menjadi pemicu munculnya kemiskinan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya manusia yang kualitasnya rendah, kurang adanya motivasi, pilihan lapangan kerja yang terbatas, dan kurangnya kreativitas.

Kemiskinan terdiri dari berbagai macam jenis. Jenis yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif adalah pemikiran seseorang bahwa dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya atau orang tersebut merasa tidak puas dengan pendapatannya. Jenis berikutnya adalah kemiskinan mutlak. Kemiskinan jenis ini berarti pendapatan seseorang atau beberapa orang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya terdapat kemiskinan relatif. Jenis kemiskinan ini adalah tipe kemiskinan yang muncul karena hasil dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau semua bagian dari masyarakat. Kebijakan itu mengakibatkan ketimpangan pendapatan, seperti rendahnya jumlah pekerjaan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Selain itu, terdapat pula kemiskinan alamiah. Jenis kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang timbul karena rendahnya jumlah sumber daya alam. Keadaan ini membuat produktivitas masyarakat menurun. Ada pula kemiskinan kultural, yang merupakan kemiskinan yang timbul karena kebiasaan orang-orang dengan budaya santai yang menghambat masyarakat untuk meningkatkan tingkat kehidupan mereka. Jenis terakhir adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena ketidakmampuan struktur sosial

dalam menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan studi pustaka, yaitu mengambil referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al Qur'an dan Hadits, kitab fiqh dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur tentang pendapat para tokoh dan hasil analisis penulis tentang indikator pembangunan terhadap kemiskinan dalam pandangan Islam. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan berbagai penelitian terdahulu, membaca, mencatat dan mengolah sebagai bahan penelitian selanjutnya (Zed, 2003). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melengkapi data atau literatur yang diperoleh secara berkala kemudian memberikan wawasan dan penjelasan agar pembaca dapat memahaminya dengan baik.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### Indikator Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan berbasis ekonomi Islam adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam perspektif ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang luas, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Pembangunan tidak boleh hanya berkaitan dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus memperhatikan masalah akhirat yaitu falah. Oleh karena itu, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan dan ajaran syariah, baik dalam bentuk firman Tuhan (Al-Qur'an), sabda Rasul (Hadits), ijma,

qiyas, maupun ijtihad para ulama. Pembangunan manusia secara keseluruhan telah menjadi target pertama dan utama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun sikap dan mentalnya. Pembangunan ekonomi juga tidak sekedar kebutuhan untuk memenuhi jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rohaninya harus seimbang (masalah oriented). Indikator pembangunan dalam perspektif Islam memiliki banyak pendapat, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI).

Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI) atau Islamic Human Development Index (I-HDI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Menurut Chapra (1993), ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu mensejahterakan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia, yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl) yang biasa kita kenal dengan maqashid syariah. Fokus pembangunan ekonomi tidak hanya terletak pada pembangunan material semata, tetapi juga menempatkan manusia sebagai subjek dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai khalifah di bumi.

Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, manusia tidak hanya sebagai seorang pemimpin, melainkan juga sebagai makhluk Allah SWT. yang paling mulia dengan fungsi

khalifah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks inilah, manusia perlu senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Menurut Siddiqui (1987), ia berpendapat bahwasanya pendekatan pembangunan sumber daya manusia dalam perspektif Islam mengandung komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Komponen nilai Allah Swt.,
- b. Komponen sosial,
- c. Komponen komunikasi,
- d. Komponen ilmu pengetahuan praktis, dan
- e. Komponen pengelolaan. Islam menyerukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan waktu, tempat, dan sumber daya.

Indeks pembangunan manusia Islam (I-HDI) mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat (falah). Menurut al-Syatibi (1922) menyatakan bahwa masalah dasar kehidupan manusia terdiri dari maqashid syariah yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup juga tidak tercapai sepenuhnya. Sebaliknya, jika kita berhasil memenuhi lima kebutuhan secaraimbang, niscaya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat akan tercapai.

Zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu sistem ekonomi Islam. Selain I-HDI, ada juga Index Zakat Nasional (IZN) yang dikembangkan oleh Pusat Kajian

Strategis Baznas, yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi makro dan mikro. Dimensi makro memiliki tiga indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah untuk zakat, dan database lembaga zakat resmi muzakki dan mustahik. Sedangkan dimensi mikro terdiri atas indikator kelembagaan dan dampak zakat. Teknik estimasi penghitungan dalam memperoleh nilai IZN dengan metode *multi-stage weighted index*. Nilai indeks berada pada rentang 0,00 – 1,00. Semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan.

### **Kemiskinan dalam Perspektif Islam**

Dalam Islam, miskin memiliki pengertian yang berbeda dengan fakir. Miskin berarti seseorang yang hanya bisa memenuhi setengah atau lebih kebutuhan pokoknya. Sementara fakir adalah seseorang yang tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan hidup atau pokok menurut perspektif Islam terdiri dari agama, kesehatan jasmani, pengetahuan, keturunan, dan harta. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa definisi dalam pengertian kemiskinan, beberapa diantaranya adalah Al-Maskanat yang berarti orang yang tidak memiliki harta benda. Kata lainnya adalah Al-Aliyat yang merupakan kata benda yang berarti kemiskinan. Menurut Al-Quran, kemiskinan dapat terjadi akibat kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang difirmankan di surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Selain itu Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 180 : “Dan jangan sekali-kali

orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat". Bisa diartikan bahwa kekikiran atau ketidakpedulian orang-orang kaya menjadi salah satu pemicu munculnya kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam merupakan sebuah situasi dimana manusia sangat membutuhkan karunia tidak mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Kemiskinan maupun kekayaan adalah cobaan untuk semua umat muslim. Kelompok miskin diuji untuk dilihat tingkat kesabarannya sementara kelompok kaya dilihat apakah mereka masih ingat dengan Allah atau terlena dengan harta mereka.

Dari semua itu, bisa dipahami bahwa arti dari kemiskinan menurut Islam adalah sebuah situasi dimana manusia yang sangat membutuhkan karunia dari Allah SWT tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemiskinan ataupun kekayaan adalah bagian dari ujian untuk semua umat muslim.

### **Pengaruh Indikator Pembangunan terhadap Kemiskinan**

Pembangunan merupakan suatu proses atau upaya pemerintah dalam melakukan perubahan ke arah yang positif yakni tercapainya kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan indikator-indikator yang akan mendukung tercapainya pembangunan yang berhasil. Dalam pembangunan terdapat indikator - indikator yang mempengaruhi, beberapa diantaranya indikator jumlah penduduk, indikator pendidikan dan kesehatan. Menurut Sayifullah & Tia R. G. (2016) pembangunan ekonomi pada umumnya memiliki tiga indikator yang pokok,

diantaranya indikator moneter yang mencakup tingkat pendapatan (*income*) yang dimiliki masyarakat dan indikator non moneter yang mencakup pendidikan, kesehatan dan indeks kualitas hidup. Konteks dalam Indikator Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mampu dicapai oleh masyarakat. Indikator pendidikan ini salah satunya dipengaruhi oleh tingkat jumlah penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu negara maka semakin bertambah kewajiban pemerintah untuk menyamaratakan hak seluruh masyarakat agar dapat menduduki bangku sekolah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam program wajib sekolah yang berlaku di Indonesia yakni 12 tahun masa sekolah, diantaranya 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah dan 3 tahun di sekolah menengah atas.

Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator utama dan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia khususnya dalam menyikapi tantangan dunia harus mengedepankan kualitas SDM bukan pada kuantitasnya. Jika membicarakan kuantitas atau jumlah, maka Indonesia sudah memiliki SDM yang melimpah. Namun permasalahannya, Indonesia masih belum mampu menciptakan seluruhnya SDM yang berkualitas dan dapat berdaya saing tinggi. Pada dasarnya, meningkatkan kualitas SDM dapat dimulai dengan pemenuhan hak seluruh masyarakat dalam mengenyam pendidikan selama 12 tahun masa belajar yang berlaku. Tetapi pada nyatanya, masih banyak penduduk Indonesia khususnya di daerah pedalaman atau pelosok yang belum tersentuh bantuan pemerintah terhadap akses pendidikan. Sejauh mana tingkat pendidikan yang masyarakat tempuh, setidaknya akan membuka lebar pintu kesuksesan mereka dimasa yang akan datang. Tidak semua orang yang berhasil pasti mengenyam pendidikan yang tinggi, bahkan diantaranya

mungkin hanya sampai SD, SMP atau SMA/SMK saja. Namun, dengan seseorang dapat menempuh tingkat yang lebih tinggi yakni universitas, maka akan membuka jalan lebih besar dalam meraih keberhasilan. Dengan masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik, maka di masa yang akan datang mereka akan menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. SDM yang berkualitas ini, nantinya juga akan membuka gerbang yang lebar untuk mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan akan hidupnya bahkan lebih dari kata cukup. Pada akhirnya pencapaiannya keberhasilan ini, maka akan berpengaruh pada peningkatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerataan tingkat pendidikan perlu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan dalam negeri.

Pemberian akses pendidikan kepada seluruh penduduk dapat melalui beberapa cara, diantaranya mendirikan sekolah-sekolah di wilayah pedalaman, membangun infrastruktur seperti jalan aspal dan jembatan penyebrangan yang dapat memudahkan para siswa serta guru untuk tiba di sekolah dan memberikan bantuan beasiswa kepada para pelajar yang masuk dalam kualifikasi sebagai penerima agar mereka dapat bersekolah hingga tingkat tinggi setelah lulus 12 tahun pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun luar negeri. Membuka gerbang yang luas untuk para pelajar Indonesia menuntut ilmu di luar negeri, dapat menciptakan SDM yang berdaya saing tinggi dan hal tersebut dapat menarik perhatian negara lain terhadap kualitas mereka. Salah satu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Kampus Merdeka. Program ini memiliki delapan kegiatan, diantaranya kampus mengajar, magang, pertukaran pelajar, wirausaha, proyek kemanusiaan,

riset dan penelitian, studi independen dan pengabdian masyarakat/membangun desa. Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam program Kampus Merdeka ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan menciptakan kualitas SDM yang mumpuni.

## E. Penutup

Pembangunan berbasis ekonomi Islam adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam perspektif ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang luas, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus memperhatikan masalah akhirat yaitu falah. Pembangunan ekonomi juga tidak sekedar kebutuhan untuk memenuhi jasmani, tetapi juga kebutuhan rohaninya harus seimbang. Kemiskinan maupun kekayaan adalah cobaan untuk semua umat muslim. Kelompok miskin diuji untuk dilihat tingkat kesabarannya. Pembangunan ekonomi pada umumnya memiliki tiga indikator yang pokok, diantaranya indikator moneter yang mencakup tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat dan indikator non moneter yang mencakup pendidikan, kesehatan dan indeks kualitas hidup. Sumber daya manusia bisa menjadi lebih berkualitas jika adanya pemerataan pendidikan.

## F. Daftar Pustaka

- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203-211.
- Iqbal, Muhammad. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam. 11.

- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Maro*, 1(2), 117-122.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 14(02), 53-68.
- Ratih, I. S., & Tamimah, T. (2021). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM ISLAM. *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 55-69.
- Senewe, Julita. Debby Ch. Rotinsulu, dan Agnes L.C.P. Lopian. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. 9(3), 175.
- Soleh, Ahmad. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. 200-201.
- Ulya, Husna Ni'matul. (2018). Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam dan Konvensional. 1(1), 135-142.
- Suripto, & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127.
- Wahyu Azizah E, Sudarti, & dan Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167-180.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236-255.